



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022



Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LKjIP BAPPEDA) Kabupaten Sumenep Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan Bupati Sumenep sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. Berbagai upaya untuk dilakukan serta hasil yang telah diperoleh, khususnya dalam perencanaan pembangunan, dijabarkan dalam laporan kinerja ini, yang sekaligus dalam mendukung upaya pencapaian target kinerja sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD 2016-2021.

Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam laporan ini tidak lepas dari kelemahan. Karena itu, laporan kinerja ini, menjadi bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Sumenep, Januari 2022



Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007





Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sesuai Pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Hasil ringkasan pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang dihasilkan di tahun 2021, dapat disimpulkan capaian kinerja di atas **100%** dari target yang ditetapkan dengan atribut capaian **Sangat Berhasil**, sebagai berikut:

Tabel Ikhtisar
Hasil Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	KRITERIA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	97,14%	Sangat Baik
		Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik	105%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	100%	Sangat Baik





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	KRITERIA
4.	Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	Hasil Survey Kepuasan Aparatur	100%	Sangat Baik

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda Kabupaten Sumenep ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kabupaten Sumenep dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.





Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Fungsi dan Tugas	3
1.4 Isu-Isu Strategis	4
1.5 Keadaan Pegawai.....	5
1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	7
1.7 Keuangan	12
1.8 Sistematika Penyusunan	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1. Perencanaan Strategis	14
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	19
2.1.3. Strategi dan arah Kebijakan	20
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	23
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021	24
2.4. Instrumen Pendukung.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2. Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	43
Lampiran :	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	





BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai bentuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, demi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kabupaten Sumenep
2. Mendorong Bappeda Kabupaten Sumenep di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kinerjanya.





- Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Kabupaten Sumenep di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2

Struktur Organisasi

Bappeda Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.

Bappeda Kabupaten Sumenep merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sumenep



**1.3****Tugas dan Fungsi**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, menetapkan bahwa Bappeda Kabupaten Sumenep mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan program kerja pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
4. Pelaksanaan pengoordinasian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;
5. Pelaksanaan pengoordinasian penelitian dan pengembangan;
6. Pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Bappeda Kabupaten Sumenep senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi





para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dan bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.4**Isu-isu Strategis**

Posisi strategis Kabupaten Sumenep perlu didukung oleh aspek perencanaan pembangunan yang memadai untuk mensinergikan segala sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Hasil perencanaan yang dihasilkan belum begitu optimal dimanfaatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya perbaikan kinerja pelaksanaan program yang didanai dari APBD;
2. Belum optimalnya ketersediaan data base untuk memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk informasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program - program kerja Pemerintah Kabupaten;
3. Kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran karena belum optimalnya implementasi kebijakan alokasi anggaran yang berkaitan dengan usulan kegiatan dari satuan kerja dikaitkan dengan pencapaian hasil yang diharapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga memunculkan deviasi antara usulan dengan penetapannya;
4. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan Peraturan Perundang - undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan



pembangunan di Kabupaten Sumenep. Dengan adanya otonomi, daerah mempunyai kewenangan untuk merencanakan pembangunan di daerahnya. Berkaitan dengan hal itu maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada Perundang - undangan yang terkait untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep;

5. Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep Tahun 2013 - 2033 yang merupakan pedoman Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan penataan ruang. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala baik dalam hal pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan dilapangan, oleh karena itu kerja sama dengan masyarakat maupun stakeholder dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu ditingkatkan.

1.5

Keadaan Pegawai

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah Pegawai di BAPPEDA Kabupaten Sumenep selaku pelaksana Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan per 31 Desember 2021 sebanyak 52 orang, dengan rincian sebagai berikut :





Tabel 1.5.1 Daftar Kepegawaian Menurut Jabatan
Bappeda Kabupaten Sumenep Th. 2021

No.	Nama Jabatan Struktural	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	Kepala OPD	1	
2	Sekretaris	1	
3	Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian	1	
4	Sub Bagian Program	1	
5	Sub Bagian Keuangan	1	
6	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	
7	Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	1	
8	Sub Bidang Pengendalian Pembangunan	1	
9	Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan	1	
10	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	
11	Sub Bidang Kependudukan dan Pemerintahan	1	
12	Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	1	
13	Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1	
14	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	
15	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	1	
16	Sub Bidang Sumber Daya Alam	1	
17	Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi	1	
18	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1	
19	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan	1	
20	Sub Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah	1	
21	Sub Bidang Pengembangan Wilayah Kepulauan	1	
22	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	
23	Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pemerintahan	1	
24	Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	1	
TOTAL		24	





Tabel 1.5.2 Jumlah Ideal Kepegawaian Berdasarkan Eselon Bappeda Kabupaten Sumenep Th. 2021

JABATAN	JUMLAH SEKARANG	JUMLAH IDEAL/KEBUTUHAN	KEKURANGAN
Eselon II	1	1	0
Eselon III	6	6	0
Eselon IV	16	17	1
JFT	3	3	0
Pelaksana	26	60	34
Jumlah	52	87	35

Gambar 1.5.1 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021



Dengan jumlah pegawai yang ada diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab BAPPEDA Kabupaten Sumenep dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

1.6

Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan





dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Kantor Bappeda Kabupaten Sumenep terletak di Jalan Trunojoyo nomor 120 diatas tanah seluas 1.400 M², dengan bangunan 2 (dua) lantai seluas 800 M². Kebutuhan tentang ruangan kerja dan ruangan pertemuan perlu ditingkatkan sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas diharapkan dapat berjalan secara optimal.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sumenep telah tersedia sarana dan prasarana berada dalam kondisi baik sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1.6
Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021

NO	NAMA/ JENIS BARANG	SATUAN	BARANG	KETERANGAN/ KONDISI
1	Mobil Suzuki Carry	Unit	6	Baik
2	Mobil Kijang kf. 50 Sp	Unit	1	Baik
3	Mobil Kijang Innova	Unit	1	Baik
4	Mobil Suzuki Ertiga	Unit	3	Baik
5	Mobil Suzuki Avansa	Unit	1	Baik
6	Sepeda Motor	Unit	47	Baik
7	Bangunan Kantor	Unit	1	Baik
8	AC	BH	34	Baik
9	Alat Pemadam Kebakaran	BH	6	Baik
10	Brankas	BH	6	Baik
11	Dispencer	BH	3	Baik
12	Filing Cabinet	BH	13	Baik
13	Lemari Besi / Metal	BH	1	Baik
14	Lemari Kaca	BH	2	Baik
15	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	BH	3	Baik





NO	NAMA/ JENIS BARANG	SATUAN	BARANG	KETERANGAN/ KONDISI
16	Mesin Ketik Manual Standard	BH	2	Baik
17	Panggung	BH	1	Baik
18	Papan Informasi/Pengumuman	BH	5	Baik
19	Rak Buku	BH	7	Baik
20	Kursi Pimpinan	BH	2	Baik
21	Kursi Eselon III	BH	9	Baik
22	Kursi Eselon IV	BH	14	Baik
23	Kursi Kerja	BH	92	Baik
24	Kursi Tamu	BH	1	Baik
25	Lemari Kayu	BH	9	Baik
26	Kursi Tamu	BH	4	Baik
27	Lemari Kayu	BH	8	Baik
28	Meja Kerja Pimpinan	BH	3	Baik
29	Meja Eselon III	BH	1	Baik
30	Meja Eselon IV	BH	1	Baik
31	Meja Kerja	BH	20	Baik
32	Meja Rapat	BH	15	Baik
33	CPU	BH	2	Baik
34	Komputer PC	BH	64	Baik
35	Monitor	BH	3	Baik
36	Scanner	BH	5	Baik
37	Note Book	BH	11	Baik
38	Printer	BH	49	Baik
39	Televisi	BH	9	Baik
40	Mesin Foto Copy	BH	1	Baik
41	Vacuum Cleaner Wet and Dry	BH	1	Baik
42	Laptop	BH	2	Baik
43	Speaker Simbadda	BH	2	Baik





NO	NAMA/ JENIS BARANG	SATUAN	BARANG	KETERANGAN/ KONDISI
44	Meja Kerja Pimpinan	BH	3	Baik
45	Meja Kursi Tamu	BH	3	Baik
46	Kain Horden Maljino Warna Hijau Tosca	Meter	333	Baik
47	Mesin Penghancur Kertas	BH	5	Baik
48	Meja Pimpinan Rapat	BH	2	Baik
49	Meja Peserta Rapat	BH	24	Baik
50	Kursi Pimpinan Rapat	BH	8	Baik
51	Kursi Peserta Rapat	BH	80	Baik
52	Mesin Ketik (Olimpia 18")	BH	2	Baik
53	Kalkulator	BH	2	Baik
54	Kulkas	BH	3	Baik
55	Teralis Besi (Uk. 15,74 x 22,52 m)	BH	1	Baik
56	Kursi Kerja Pimpinan	BH	3	Baik
57	UPS	BH	17	Baik
58	Faximile	BH	3	Baik
59	Camera Digital	BH	4	Baik
60	Camera	BH	9	Baik
61	Handycam	BH	5	Baik
62	LCD Proyektor	BH	1	Baik
63	Wireless	BH	1	Baik
64	Radio Tape/ VCD	BH	1	Baik
65	Sound System	BH	11	Baik
66	Overhead Proyektor	BH	25	Baik
67	Layar Overhead Projector	BH	25	Baik
68	Layar Proyektor	BH	1	Baik
69	CCTV	BH	1	Baik
70	Proyektor	BH	1	Baik
71	UPS Stabilizer	BH	1	Baik



NO	NAMA/ JENIS BARANG	SATUAN	BARANG	KETERANGAN/ KONDISI
72	Tabung Pemadam Kebakaran	BH	4	Baik
73	Server/Mainframe	BH	1	Baik
74	Jaringan Komputer	BH	1	Baik
75	Instalasi Listrik	BH	1	Baik
76	Mikrofon	BH	1	Baik
77	Mesin Tik	BH	7	Baik
78	Waste BIN BLK Ek9425/GPX-25(Asbak)	BH	8	Baik
79	Almari Besi	BH	1	Baik
80	Kartu / Mesin Absensi	BH	1	Baik
81	Kotak Pengaduan	BH	1	Baik
82	Telephone (Pabx)	BH	1	Baik
83	Server Komputer	BH	1	Baik
84	Server Rackmount	BH	2	Baik
85	PC	BH	23	Baik
86	Hardisk Eksternal	BH	7	Baik
87	Hardisk Server	BH	1	Baik
88	Lampu Hias	BH	1	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.



**1.7****Keuangan**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Sumenep. Pada Tahun Anggaran 2021 Bappeda Kabupaten Sumenep mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 11.433.998.680,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 10.477.635.532,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program didukung oleh 4 program dan 17 kegiatan.

1.8**Sistematika Penyusunan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Sumenep Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN





BAB II

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep merupakan manifestasi komitmen Bappeda Kabupaten Sumenep dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 06 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2011-2015).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Bappeda Kabupaten Sumenep yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumenep Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 18 April 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.

1.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi





kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan yang sudah maju, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Sumenep juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, Visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;
- d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Penentuan Visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah

“SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”





Di dalam visi tersebut terdapat 7 makna kata kunci yaitu : Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

2. Misi

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Misi Pertama, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.

Misi Kedua, Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.

Misi Keempat, Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.

Misi Kelima, Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.

Misi Keenam, Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.





Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel : 2.3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep 2016 - 2021

Visi: Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional

MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumenep	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah
				Angka Harapan Lama Sekolah
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
			Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
				Persentase Penurunan Masalah Sosial
2 Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daratan dan wilayah kepulauan	Indeks kualitas layanan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik
				Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik
				Indeks Kinerja Irigasi
				Persentase aksesibilitas wilayah kepulauan dan daratan
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemukiman/ perumahan secara memadai	Persentase rumah sehat
				Rasio Elektrifikasi
				Indeks kualitas air sungai
				Indeks kualitas udara
				Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi





MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
3 Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani
				Nilai Tukar Nelayan
			Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura
				Jumlah Produksi Hasil Perkebunan
				Jumlah Produksi Hasil Peternakan
				Jumlah Produksi Hasil perikanan
			Meningkatnya Konsumsi Pangan dan Keragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
			Meningkatnya daya saing sektor Industri dan Perdagangan	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah
				Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan
				Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian
			Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat
				Persentase pertumbuhan UMKM
			Meningkatnya daya tarik pariwisata	Persentase kunjungan wisatawan
Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				
Meningkatnya daya tarik investasi	Jumlah investor			
	Jumlah nilai investasi			
Meningkatnya kemandirian keuangan pemerintah daerah	Persentase PAD terhadap APBD			
4 Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai SKM	Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemda	Nilai SAKIP
				Opini BPK
				Peringkat LPPD
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	Nilai SKM Unit-unit layanan Publik
				E-Government / Indeks SPBE





MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
5 Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan	Meningkatkan kemandirian masyarakat desa	Indeks Desa membangun	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam aspek ketahanan lingkungan (ekologi), ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial	Persentase BUMDes yang sehat
				Persentase desa mandiri
	Meningkatkan stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat	Indeks keamanan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Pencegahan pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS)
				Indeks Pemberdayaan Gender
6 Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi dengan semangat nasionalisme dan kearifan lokal	Indeks Toleransi	Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama	Persentase penurunan konflik sosial
				Meningkatnya Pelestarian Nilai-nilai seni dan budaya

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Bappeda Kabupaten Sumenep berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu: meningkatnya pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan indikator capaian sasaran nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Sumenep

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.





Adapun tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Sumenep sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.1
Tujuan Dan Sasaran Yang Ditetapkan Untuk Mencapai
Visi Dan Misi Bupati Sumenep

Tujuan		Sasaran Strategis	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemda	Nilai SAKIP	Terwujudnya Akuntabilitas Perencanaan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Bobot Perencanaan Kinerja
	Peringkat LPPD		Bobot Pengukuran Kinerja
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
			Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik
			Persentase OPD dengan Capaian Program Baik
	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	
Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	Hasil Survey Kepuasan Aparatur		

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, maka Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, melalui strategi meningkatkan integrasi dan sinergitas dokumen perencanaan dengan Arah Kebijakan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistic, teknokratik dan partisipatif;





- b. Sasaran meningkatnya kualitas kajian penelitian dan pengembangan melalui strategi melakukan kajian, penelitian dan pengembangan inovatif yang ditindaklanjuti dengan pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengembangan oleh OPD;
- c. Sasaran meningkatnya sarana layanan perkantoran melalui strategi membangun manajemen operasional dan kualitas sumber daya aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel dengan aearh kebijakan melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Tabel : 2.1.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Perlunya penyusunan dokumen perencanaan dan kajian pembangunan yang berkualitas dan tepat waktu didukung dengan data yang cukup handal serta serta didukung peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan daerah;	Mewujudkan Akuntabilitas Perencanaan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan integrasi dan sinergitas dokumen perencanaan dengan Arah Kebijakan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistic, teknokratik dan partisipatif	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistic, teknokratik dan partisipatif
		Meningkatnya kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan inovatif yang ditindaklanjuti dengan pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengembangan oleh OPD	Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang inovatif





ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	Membangun manajemen operasional dan kualitas sumber daya aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel dengan aearh kebijakan melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda	Melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda

Rencana Strategis Kabupaten Sumenep pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 - 2021 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maupun dalam Kebijakan Strategis di Kabupaten Sumenep menetapkan Rencana Strategis Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi kedepan.





Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan Bidang Pembangunan. Reformasi tersebut pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual sistematis dan berkelanjutan.

2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 yang telah disusun, maka Bappeda Kabupaten Sumenep telah menyusun Perjanjian Kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	1.1.	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	70%
1.a.	Meningkatnya Rencana Program-Kegiatan Pembangunan Daerah dan Pengembangan Data/ Informasi, Pelaporan Pembangunan Daerah	1.1.a.	Persentase Program/ Kegiatan RKPD yang diakomodir dalam PPAS	100%
1.b.	Tersusunnya Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	1.1.b.	Persentase Dokumen Keuangan disusun tepat waktu	100%
		1.2.	Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik	85%
1.c.	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.2.c.	Persentase OPD yang difasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	
2.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	2.1.	Persentase Hasil Penelitian/ Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	50%
2.a.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah	2.1.a.	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	100%



2.3

Rencana Anggaran Tahun 2021

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA Bappeda Kabupaten Sumenep, pada tabel sebagai berikut:

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN											
KODE	URAIAN	JUMLAH				JUMLAH				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM	SEBELUM	SEBELUM	SEBELUM	SEBESAR	SEBESAR	SEBESAR	SEBESAR		
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	JUMLAH (SEBELUM)	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	JUMLAH (SEBESAR)		
5											
5	1										
5	1	1									
5	1	1	2.01								
5	1	1	2.01	1	6.341.920	0	0	0	6.341.920	0	0
5	1	1	2.01	2	3.261.400	0	0	0	3.261.400	0	0
5	1	1	2.01	3	3.261.400	0	0	0	3.261.400	0	0
5	1	1	2.01	4	3.255.400	0	0	0	3.255.400	0	0
5	1	1	2.01	5	3.440.200	0	0	0	3.440.200	0	0
5	1	1	2.01	6	9.324.000	0	0	0	9.324.000	8.004.000	0
5	1	1	2.01	7	7.527.200	0	0	0	7.527.200	7.527.200	0
5	1	1	2.02								
5	1	1	2.02	1	6.267.277.825	0	0	0	6.267.277.825	6.229.477.825	0
5	1	1	2.02	5	7.096.080	0	0	0	7.096.080	7.096.080	0
5	1	1	2.02	7	7.657.704	0	0	0	7.657.704	7.657.704	0
5	1	1	2.05								
5	1	1	2.05	9	19.560.000	0	0	0	19.560.000	19.560.000	0
5	1	1	2.06								
5	1	1	2.06	1	14.032.884	0	0	0	14.032.884	14.032.884	0
5	1	1	2.06	2	74.563.937	5.219.200	0	0	79.783.137	78.926.737	17.119.630
5	1	1	2.06	4	86.542.056	0	0	0	86.542.056	86.542.056	0
5	1	1	2.06	5	16.542.504	0	0	0	16.542.504	12.793.200	0
5	1	1	2.06	6	110.376.000	0	0	0	110.376.000	74.496.000	0
5	1	1	2.06	9	216.698.000	0	0	0	216.698.000	131.139.000	0
5	1	1	2.06	10	63.881.170	0	0	0	63.881.170	63.881.170	0
5	1	1	2.07								
5	1	1	2.07	5	0	59.387.038	0	0	59.387.038	0	69.923.608





REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

KODE	URAIAN	JUMLAH									
		SEBELUM				SESUDAH					
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	JUMLAH (SEBELUM)	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	JUMLAH (SESUDAH)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
5 1 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.260.000	284.510.660	0	291.770.660	7.260.000	583.865.780	0	591.125.780	299.355.120	
5 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.993.938	0	0	228.993.938	190.855.070	0	0	190.855.070	-38.138.868	
5 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.993.938	0	0	228.993.938	190.855.070	0	0	190.855.070	-38.138.868	
5 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.876.177	60.135.239	0	240.011.416	234.419.688	56.610.839	0	291.030.527	51.019.111	
5 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.296.287	0	0	161.296.287	152.404.063	0	0	152.404.063	-8.892.224	
5 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.579.890	3.524.400	0	22.104.290	33.005.510	0	0	33.005.510	10.901.220	
5 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	56.610.839	0	56.610.839	49.010.115	56.610.839	0	105.620.954	49.010.115	
5 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.549.264.356	0	0	1.549.264.356	1.164.728.496	0	0	1.164.728.496	-384.535.860	
5 1 2 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	879.976.900	0	0	879.976.900	615.157.180	0	0	615.157.180	-264.819.720	
5 1 2 2.01 4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	7.413.700	0	0	7.413.700	5.038.700	0	0	5.038.700	-2.375.000	
5 1 2 2.01 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	267.664.880	0	0	267.664.880	37.896.760	0	0	37.896.760	-229.768.120	
5 1 2 2.01 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	604.898.320	0	0	604.898.320	572.221.720	0	0	572.221.720	-32.676.600	
5 1 2 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	31.727.376	0	0	31.727.376	20.045.036	0	0	20.045.036	-11.682.340	
5 1 2 2.02 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	31.727.376	0	0	31.727.376	20.045.036	0	0	20.045.036	-11.682.340	
5 1 2 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	637.560.080	0	0	637.560.080	529.526.280	0	0	529.526.280	-108.033.800	
5 1 2 2.03 1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	62.640.320	0	0	62.640.320	42.305.520	0	0	42.305.520	-20.334.800	
5 1 2 2.03 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	574.919.760	0	0	574.919.760	487.220.760	0	0	487.220.760	-87.699.000	
5 1 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.312.484.067	0	0	1.312.484.067	746.038.927	0	0	746.038.927	-566.445.140	
5 1 3 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	441.997.672	0	0	441.997.672	277.609.992	0	0	277.609.992	-164.387.680	
5 1 3 2.01 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	98.034.900	0	0	98.034.900	32.314.500	0	0	32.314.500	-65.720.400	
5 1 3 2.01 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	141.322.060	0	0	141.322.060	130.192.060	0	0	130.192.060	-11.130.000	
5 1 3 2.01 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22.683.556	0	0	22.683.556	15.519.356	0	0	15.519.356	-7.164.200	
5 1 3 2.01 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.962.320	0	0	100.962.320	52.166.240	0	0	52.166.240	-48.796.080	
5 1 3 2.01 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	54.304.660	0	0	54.304.660	32.154.660	0	0	32.154.660	-22.150.000	
5 1 3 2.01 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24.690.176	0	0	24.690.176	15.263.176	0	0	15.263.176	-9.427.000	
5 1 3 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	384.299.891	0	0	384.299.891	208.966.051	0	0	208.966.051	-175.333.840	
5 1 3 2.02 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.713.445	0	0	60.713.445	15.162.445	0	0	15.162.445	-45.551.000	
5 1 3 2.02 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	43.940.205	0	0	43.940.205	28.940.205	0	0	28.940.205	-15.000.000	





REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

KODE	URAIAN	JUMLAH									
		SEBELUM				SESUDAH			BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	JUMLAH (SEBELUM)	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA		JUMLAH (SESUDAH)	
5 1 3 2.02 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9.352.905	0	0	9.352.905	6.787.905	0	0	6.787.905	-2.565.000	
5 1 3 2.02 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	85.887.608	0	0	85.887.608	33.221.848	0	0	33.221.848	-52.665.760	
5 1 3 2.02 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	169.326.864	0	0	169.326.864	91.198.784	0	0	91.198.784	-78.128.080	
5 1 3 2.02 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.078.864	0	0	15.078.864	33.654.864	0	0	33.654.864	18.576.000	
5 1 3 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	486.186.504	0	0	486.186.504	259.462.884	0	0	259.462.884	-226.723.620	
5 1 3 2.03 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	98.299.500	0	0	98.299.500	46.498.500	0	0	46.498.500	-51.801.000	
5 1 3 2.03 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	132.837.680	0	0	132.837.680	102.700.180	0	0	102.700.180	-30.137.500	
5 1 3 2.03 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	62.159.932	0	0	62.159.932	28.344.992	0	0	28.344.992	-33.814.940	
5 1 3 2.03 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	98.191.420	0	0	98.191.420	39.209.960	0	0	39.209.960	-58.981.460	
5 1 3 2.03 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	32.540.040	0	0	32.540.040	8.326.320	0	0	8.326.320	-24.213.720	
5 1 3 2.03 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	62.157.932	0	0	62.157.932	34.382.932	0	0	34.382.932	-27.775.000	
5 2	KEUANGAN	505.920.160	0	0	505.920.160	486.230.640	0	0	486.230.640	-19.689.520	
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	505.920.160	0	0	505.920.160	486.230.640	0	0	486.230.640	-19.689.520	
5 2 2 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	505.920.160	0	0	505.920.160	486.230.640	0	0	486.230.640	-19.689.520	
5 2 2 2.01 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	254.277.880	0	0	254.277.880	242.895.360	0	0	242.895.360	-11.382.520	
5 2 2 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	251.642.280	0	0	251.642.280	243.335.280	0	0	243.335.280	-8.307.000	
5 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.139.838.996	0	0	1.139.838.996	1.116.251.826	0	0	1.116.251.826	-23.587.170	
5 5 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.139.838.996	0	0	1.139.838.996	1.116.251.826	0	0	1.116.251.826	-23.587.170	
5 5 2 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	669.716.108	0	0	669.716.108	115.919.898	0	0	115.919.898	-553.796.210	
5 5 2 2.01 2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	628.187.648	0	0	628.187.648	89.520.648	0	0	89.520.648	-538.667.000	
5 5 2 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	41.528.460	0	0	41.528.460	26.399.250	0	0	26.399.250	-15.129.210	
5 5 2 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	226.051.960	0	0	226.051.960	671.998.300	0	0	671.998.300	445.946.340	
5 5 2 2.02 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	112.958.300	0	0	112.958.300	243.638.300	0	0	243.638.300	130.680.000	
5 5 2 2.02 3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0	164.000.000	0	0	164.000.000	164.000.000	
5 5 2 2.02 5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	0	0	0	41.000.000	0	0	41.000.000	41.000.000	
5 5 2 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	113.093.660	0	0	113.093.660	223.360.000	0	0	223.360.000	110.266.340	
5 5 2 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	115.004.280	0	0	115.004.280	183.249.280	0	0	183.249.280	68.245.000	
5 5 2 2.03 1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0	0	0	41.000.000	0	0	41.000.000	41.000.000	
5 5 2 2.03 2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0	41.000.000	0	0	41.000.000	41.000.000	
5 5 2 2.03 4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	115.004.280	0	0	115.004.280	101.249.280	0	0	101.249.280	-13.755.000	
5 5 2 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	129.066.648	0	0	129.066.648	145.084.348	0	0	145.084.348	16.017.700	
5 5 2 2.04 2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	70.070.900	0	0	70.070.900	115.186.000	0	0	115.186.000	45.115.100	
5 5 2 2.04 4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	58.995.748	0	0	58.995.748	29.898.348	0	0	29.898.348	-29.097.400	





BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam implementasi Sistem AKIP di Bappeda Kabupaten Sumenep, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Bappeda Kabupaten Sumenep pelaksanaan pengukuran kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

A. Adapun pengukuran target kinerja dari sasaran strategis diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	1.1. Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	%	70	68	97





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
		1.2. Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik	%	85	89.7	105
2.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	2.1. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	50	50	100
3.	Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	3.1. Hasil Survey Kepuasan Aparatur	Nilai IKM	85	85	100

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra Tahun Terakhir

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	1.1. Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	%	60	60	60	65	68
		1.2. Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik	%	60	75	75	80	89,7
2.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	2.1. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	50	50	50	50	50
3.	Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	3.1. Hasil Survey Kepuasan Aparatur	Nilai IKM	80	84	85	85	85

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2021	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RENSTRA s/d TAHUN 2021
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	1.1. Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	%	70	68	97
		1.2. Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik	%	85	89,7	105
2.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	2.1. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	50	50	100





NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2021	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RENSTRA s/d TAHUN 2021
3.	Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	3.1. Hasil Survey Kepuasan Aparatur	Nilai IKM	85	85	100

Tabel 3.1.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	%	70	68	97,14	1.232.269.567	1.088.239.842	88,31	8,83
		Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik	%	85	89,7	105	746.038.927	672.782.242	90,18	15,35
2.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	%	50	50	100	1.116.251.826	1.079.036.071	96,67	3,33
3.	Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Profesionalisme SDM Aparatur	Hasil Survey Kepuasan Aparatur	%	85	85	100	963.751.109	873.297.308	90,61	9,39

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan indikator kinerja yang ke 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ditarget 70% terialisasi 68% tercapai sebesar 97% dari 1297 usulan masyarakat yang diusulkan melalui Musrembang 882 usulan atau sekitar 68% telah terakomodir dalam RKPD Kabupaten Sumenep. Hal ini disebabkan banyak usulan masyarakat yang tidak lolos verifikasi karena terkendala persyaratan teknis maupun kewenangan, hal ini didukung progam adalah Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam upaya menyelelarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah dan ketersediaan data perencanaan pembangunan.





Pada Program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Secara umum capaian kinerja kegiatan pada sub bidang Perencanaan dan Pendanaan terealisasi 100%. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bidang perencanaan dan pendanaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah SKPD yang diverifikasi selaras dengan program Pembangunan Daerah, berkaitan dengan proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Terhadap renja Perangkat Daerah telah dilakukan verifikasi terhadap kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2022 serta kemampuan keuangan daerah.
- Jumlah kecamatan pengusul kegiatan, hal ini terkait tingkat partisipasi kecamatan dalam mengusulkan usulan prioritas melalui pelaksanaan musrenbang RKPD tahun 2021. Seluruh kecamatan di Kabupaten Sumenep yaitu sejumlah 27 kecamatan telah mengusulkan usulan prioritas wilayahnya melalui aplikasi SIPD. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan cukup tinggi.
- Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun tepat waktu, hal ini berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan lima tahunan. Selama tahun anggaran 2021, telah selesai disusun dokumen RKPD tahun 2022, RKPD perubahan tahun 2021 serta Perda RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026
- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun tepat waktu. Indikator ini berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA-PPAS, yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD. Pada tahun anggaran 2021, Bappeda telah menyusun dokumen KUA dan PPAS tahun 2022.





- Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun tepat waktu. Indikator ini berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RAPBD. Pada tahun anggaran 2021, Bappeda telah menyusun dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2021.
- 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Capaian kinerja sub bidang Evaluasi dan Pelaporan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Secara rinci penyebab keberhasilan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:
- Jumlah SKPD yang memenuhi data dan informasi pembangunan yang menjadi target pada tahun 2021 sebanyak 58 SKPD, terealisasi sebanyak 58 SKPD, maka mengalami keberhasilan capaian kinerja di Tahun Anggaran 2021 sebesar 100%.
 - Jumlah laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah sebanyak 1 laporan terealisasi 100% sehingga penyusunan pertanggungjawaban disusun tepat waktu.
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Secara umum capaian kinerja sub bidang Pengendalian Pembangunan terealisasi 100% dapat diuraikan sebagai berikut:
- Jumlah Laporan yang realisasi Hibah dan Bantuan Sosial yang disusun dan menjadi target pada tahun 2021 sebanyak 1 Laporan, terealisasi sebanyak 1 Laporan. Capaian realisasi ini tidak lepas dari peran serta OPD pengampu hibah dan bantuan social.
 - Jumlah laporan berkala/triwulan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebanyak 4 laporan terealisasi 100% sehingga penyusunan pertanggungjawaban disusun tepat waktu.





- Disamping penyusunan laporan hibah dan bantuan social dan laporan berkala realisasi DAK Fisik 2021, tersusun pula dokumen yang berupa Peraturan Bupati Sumenep tentang Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli Bupati yang bertujuan untuk membantu OPD dalam penyusunan kerangka kerja tahunan sehingga apa yang menjadi visi misi bupati dapat tercapai.
2. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan indikator kinerja yang ke 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik ditarget 85% teralisasi capaian kinerja sebesar 89,7% dari Jumlah OPD dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik tepat waktu dalam penetapan sebanyak 52 OPD hanya 6 OPD mengalami keterlambatan pemenuhan dalam penyampaian dokumen perencanaan dari total 58 OPD. Hal ini menggambarkan suatu keberhasilan capaian kinerja sebesar 105% didukung progam adalah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya menyelelarkan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Renstra, Renja OPD.

Pada Program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Secara umum capaian kinerja Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan, Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dan Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan terealisasi 100% dapat diuraikan sebagai berikut:

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.





- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Secara umum capaian kinerja Sub Bidang Pertanian dan Perikanan, Sub Bidang Sumber Daya Alam, dan Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi terealisasi 100% dapat diuraikan sebagai berikut:

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan





Secara umum capaian kinerja Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Sub Bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah, dan Sub Bidang Pengembangan Wilayah Kepulauan terealisasi 100% dapat diuraikan sebagai berikut:

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.
3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan yaitu Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan ditarget 50% realisasi kinerja yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Pada kegiatan ini difokuskan pada:
 - a. Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan stakeholder penelitian
 - b. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Pada tahun 2021 jumlah kajian pada kegiatan ini mencapai 13 kajian yang meliputi:





- a. Aspek Sosial
 - Penelitian Indeks Kesalehan Masyarakat Sumenep Tahun 2021
 - Penelitian Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintahan Kabupaten Sumenep Tahun 2021
 - b. Pendidikan dan Kebudayaan
 - Penelitian secara seksama dan Konfrehensif sebagai bahan kajian dan evaluasi terhadap sekolah unggulan di kabupaten Sumenep.
 - Penelitian di atas, ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sumenep.
 - c. Pariwisata
 - Pengembangan Pembangunan Pariwisata Perspektif Hexahelix Di Kabupaten Sumenep
 - d. Partisipasi masyarakat
 - Penelitian Model Pengembangan Entrepreneurship Berbasis Pesantren di Kabupaten Sumenep
- 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- Pada tahun ini kegiatan kajian/penelitian pada kegiatan ini mencapai 3 kajian yakni dengan tema Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM serta pertanian dan ketahanan pangan.
- Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah di lakukan, kami tim peneliti dari LPPM Institut Sains dan Teknologi Annuqayah merekomendasikan:
- a. Bagi pemerintah Desa, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan potensi desa sebagai produk unggulan dan program peningkatan ekonomi masyarakat.





- b. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG), dibutuhkan program pembinaan serta pendampingan berkelanjutan terhadap kelompok petani kelapa di Desa nyabakan Timur yang telah terbentuk hingga menjadi sentra UKM produsen produk olahan kelapa di Kabupaten Sumenep.
 - c. Bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Sumenep dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pembentukan UKM Produsen olahan produk kelapa dengan memberdayakan petani kelapa yang jumlahnya sangat besar di Kabupaten Sumenep dapat menjadi salah satu cara meningkatkan kesejahteraan Masyarakat khususnya para Petani atau Masyarakat umum yang memiliki sumber daya alam berupa pohon kelapa.
 - d. Bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Sumenep, kesuksesan dalam program pembinaan serta pendampingan dapat dijadikan Standart Operational Procedure (SOP) atau standart baku untuk pembinaan serta pendampingan kelompok petani kelapa di desa-desa lain di Kabupaten Sumenep.
 - e. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pembentukan sentra UKM Produsen produk olahan kelapa berbasiskan warga binaan dapat menjadi program unggulan untuk menghasilkan produk-produk unggulan daerah yang berdasarkan pada kearifan lokal serta wadah peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - f. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perlu adanya pendampingan berupa tim pendamping atau penyuluh dalam proses pemasaran hasil produksi berbasiskan produk-produk unggulan desa.
- 4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi





Pada tahun ini kegiatan ini difokuskan pada implementasi dan kompetisi inovasi daerah dan sosialisasi hasil-hasil kelitbangan diantaranya:

- e. Peningkatan inovasi daerah melalui kegiatan “Anugerah Inovasi Daerah Tahun 2021”. Anugerah Inovasi Daerah adalah kegiatan pemberian penghargaan kepada OPD, Puskesmas dan Masyarakat yang memiliki keunggulan inovasi sesuai dengan bidang masing-masing. Tahapan Anugerah Inovasi Daerah yaitu tahap I adalah pengusulan inovasi kepada panitia dan tahap adalah tahap wawancara (peserta yang lulus tahap II). Pada ajang Anugerah Inovasi Daerah Tahun 2021, telah berhasil menjangring 88 Inovasi dengan rincian 20 Inovasi Kategori Perangkat Daerah, 20 Inovasi Puskesmas dan 48 Inovasi Kategori masyarakat.
- f. Sosialisasi hasil kelitbangan dilakukan dengan pembuatan Jurnal Karaton. Jurnal ini berisi hasil-hasil kajian/penelitian sepanjang tahun 2021. Penerbitan jurnal “Karaton” ini merupakan sebuah terobosan baru di Bidang Penelitian dan Pengembangan, untuk memberikan informasi hasil-hasil kajian yang dilaksanakan selama satu tahun. Namun, ada hambatan dalam mencapai terobosan yang maksimal, yakni penerbitan jurnal Karaton hanya sebatas Jurnal cetak, bukan online (OJS). Hal ini karena pada tahun 2021 masih belum dianggarkan penyediaan aplikasi website jurnal online.

3.2**Realisasi Anggaran**

Realisasi anggara program/kegiatan merupakan realisasi penyerapan anggaran program/kegiatan tahun anggaran 2021. Adapun realisasi program/kegiatan secara rinci sebagaimana tabel berikut:





Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH (RP)		SISA ANGGARAN (RP)	%
							PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
501	40301	00	00	5		BELANJA DAERAH	11.433.998.680,00	10.477.635.532,01	(956.363.147,99)	91,64
501	40301	00	00	5	1	BELANJA OPERASI	10.706.478.823,00	9.752.531.810,00	(953.947.013,00)	91,09
501	40301	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.193.228.934,00	6.582.090.363,00	(611.138.571,00)	91,50
501	40301	01	20			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.229.477.825,00	5.708.793.055,00	(520.684.770,00)	91,64
501	40301	00	00	5	1 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.096.080,00	6.760.000,00	(336.080,00)	95,26
501	40301	00	00	5	1 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.657.704,00	7.085.200,00	(572.504,00)	92,52
501	40301	01	20			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.091.520,00	29.608.500,00	(5.483.020,00)	84,38
501	40301	00	00	5	1 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.341.920,00	5.865.000,00	(476.920,00)	92,48
501	40301	00	00	5	1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.261.400,00	2.943.000,00	(318.400,00)	90,24
501	40301	00	00	5	1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.261.400,00	2.891.000,00	(370.400,00)	88,64
501	40301	00	00	5	1 02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.255.400,00	2.901.000,00	(354.400,00)	89,11
501	40301	00	00	5	1 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.440.200,00	3.071.000,00	(369.200,00)	89,27
501	40301	00	00	5	1 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.004.000,00	5.409.500,00	(2.594.500,00)	67,58
501	40301	00	00	5	1 02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.527.200,00	6.528.000,00	(999.200,00)	86,73
501	40301	01	20			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.560.000,00	18.000.000,00	(1.560.000,00)	92,02
501	40301	00	00	5	1 02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.560.000,00	18.000.000,00	(1.560.000,00)	92,02
501	40301	01	20			Administrasi Umum Perangkat Daerah	461.811.047,00	423.375.928,00	(38.435.119,00)	91,68
501	40301	00	00	5	1 02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.032.884,00	12.524.000,00	(1.508.884,00)	89,25
501	40301	00	00	5	1 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.926.737,00	74.354.500,00	(4.572.237,00)	94,21
501	40301	00	00	5	1 02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.542.056,00	74.071.000,00	(12.471.056,00)	85,59
501	40301	00	00	5	1 02	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.793.200,00	12.585.000,00	(208.200,00)	98,37
501	40301	00	00	5	1 02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74.496.000,00	62.174.000,00	(12.322.000,00)	83,46
501	40301	00	00	5	1 02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.139.000,00	125.715.268,00	(5.423.732,00)	95,86
501	40301	00	00	5	1 02	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	63.881.170,00	61.952.160,00	(1.929.010,00)	96,98
501	40301	01	20			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.260.000,00	7.200.000,00	(60.000,00)	99,17
501	40301	00	00	5	1 02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.260.000,00	7.200.000,00	(60.000,00)	99,17
501	40301	01	20			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.855.070,00	150.954.947,00	(39.900.123,00)	79,09
501	40301	00	00	5	1 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.855.070,00	150.954.947,00	(39.900.123,00)	79,09
501	40301	01	20			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.419.688,00	230.312.733,00	(4.106.955,00)	98,25
501	40301	00	00	5	1 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.404.063,00	148.582.733,00	(3.821.330,00)	97,49
501	40301	00	00	5	1 02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.005.510,00	32.730.000,00	(275.510,00)	99,17
501	40301	00	00	5	1 02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.010.115,00	49.000.000,00	(10.115,00)	99,98
501	40301	01	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.753.784,00	13.845.200,00	(908.584,00)	93,84
501	40301	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.164.728.496,00	1.003.165.534,00	(161.562.962,00)	86,13
501	40301	02	10			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	615.157.180,00	480.407.597,00	(134.749.583,00)	78,10
501	40301	00	00	5	1 02	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	5.038.700,00	4.941.000,00	(97.700,00)	98,06
501	40301	00	00	5	1 02	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	37.896.760,00	36.130.000,00	(1.766.760,00)	95,34





KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH (RP)		SISA ANGGARAN (RP)	%
								PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
501	40301	00	00	5	1	02	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	572.221.720,00	439.336.597,00	(132.885.123,00)	76,78
501	40301	02	10				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.045.036,00	13.951.500,00	(6.093.536,00)	69,60
501	40301	00	00	5	1	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	20.045.036,00	13.951.500,00	(6.093.536,00)	69,60
501	40301	02	10				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	529.526.280,00	508.806.437,00	(20.719.843,00)	96,09
501	40301	00	00	5	1	02	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	42.305.520,00	32.493.400,00	(9.812.120,00)	76,81
501	40301	00	00	5	1	02	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	487.220.760,00	476.313.037,00	(10.907.723,00)	97,76
501	40301	03					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	746.038.927,00	672.782.242,00	(73.256.685,00)	90,18
501	40301	03	10				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	277.609.992,00	223.324.700,00	(54.285.292,00)	80,45
501	40301	00	00	5	1	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	32.314.500,00	21.532.500,00	(10.782.000,00)	66,63
501	40301	00	00	5	1	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	130.192.060,00	112.945.000,00	(17.247.060,00)	86,75
501	40301	00	00	5	1	02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.519.356,00	11.359.500,00	(4.159.856,00)	73,20
501	40301	00	00	5	1	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	52.166.240,00	49.343.200,00	(2.823.040,00)	94,59
501	40301	00	00	5	1	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32.154.660,00	16.081.000,00	(16.073.660,00)	50,01
501	40301	00	00	5	1	02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	15.263.176,00	12.063.500,00	(3.199.676,00)	79,04
501	40301	03	10				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	208.966.051,00	203.832.942,00	(5.133.109,00)	97,54
501	40301	00	00	5	1	02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	33.654.864,00	32.930.500,00	(724.364,00)	97,85
501	40301	00	00	5	1	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	15.162.445,00	14.910.000,00	(252.445,00)	98,34
501	40301	00	00	5	1	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	28.940.205,00	28.499.100,00	(441.105,00)	98,48
501	40301	00	00	5	1	02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.787.905,00	6.528.500,00	(259.405,00)	96,18
501	40301	00	00	5	1	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	33.221.848,00	32.611.500,00	(610.348,00)	98,16
501	40301	00	00	5	1	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	91.198.784,00	88.353.342,00	(2.845.442,00)	96,88
501	40301	03	10				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	259.462.884,00	245.624.600,00	(13.838.284,00)	94,67
501	40301	00	00	5	1	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	102.700.180,00	99.862.400,00	(2.837.780,00)	97,24
501	40301	00	00	5	1	02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	28.344.992,00	27.969.000,00	(375.992,00)	98,67
501	40301	00	00	5	1	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	39.209.960,00	36.132.400,00	(3.077.560,00)	92,15





KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH (RP)		SISA ANGGARAN (RP)	%
								PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
501	40301	00	00	5	1	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8.326.320,00	7.540.000,00	(786.320,00)	90,56
501	40301	00	00	5	1	02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	34.382.932,00	28.358.500,00	(6.024.432,00)	82,48
501	40301	00	00	5	1	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.498.500,00	45.762.300,00	(736.200,00)	98,42
502	40301	02					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	486.230.640,00	415.457.600,00	(70.773.040,00)	85,44
502	40301	02	20				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	486.230.640,00	415.457.600,00	(70.773.040,00)	85,44
502	40301	00	00	5	1	02	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	242.895.360,00	204.375.100,00	(38.520.260,00)	84,14
502	40301	00	00	5	1	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	243.335.280,00	211.082.500,00	(32.252.780,00)	86,75
505	40301	02					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.116.251.826,00	1.079.036.071,00	(37.215.755,00)	96,67
505	40301	02	50				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	115.919.898,00	92.660.721,00	(23.259.177,00)	79,94
505	40301	00	00	5	1	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	89.520.648,00	68.171.221,00	(21.349.427,00)	76,15
505	40301	00	00	5	1	02	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	26.399.250,00	24.489.500,00	(1.909.750,00)	92,77
505	40301	02	50				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	671.998.300,00	668.886.600,00	(3.111.700,00)	99,54
505	40301	00	00	5	1	02	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	223.360.000,00	222.395.200,00	(964.800,00)	99,57
505	40301	00	00	5	1	02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	243.638.300,00	242.381.400,00	(1.256.900,00)	99,48
505	40301	00	00	5	1	02	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	41.000.000,00	40.700.000,00	(300.000,00)	99,27
505	40301	00	00	5	1	02	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	164.000.000,00	163.410.000,00	(590.000,00)	99,64
505	40301	02	50				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	183.249.280,00	182.049.000,00	(1.200.280,00)	99,35
505	40301	00	00	5	1	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	41.000.000,00	40.860.000,00	(140.000,00)	99,66
505	40301	00	00	5	1	02	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	41.000.000,00	40.980.000,00	(20.000,00)	99,95
505	40301	00	00	5	1	02	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	101.249.280,00	100.209.000,00	(1.040.280,00)	98,97
505	40301	02	50				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	145.084.348,00	135.439.750,00	(9.644.598,00)	93,35
505	40301	00	00	5	1	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	115.186.000,00	108.449.750,00	(6.736.250,00)	94,15
505	40301	00	00	5	1	02	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	29.898.348,00	26.990.000,00	(2.908.348,00)	90,27
505	40301	02	50				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	0,00	0,00	0,00	0,00
501	40301	00	00	5	2		BELANJA MODAL	727.519.857,00	725.103.722,01	(2.416.134,99)	99,67
501	40301	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	727.519.857,00	725.103.722,01	(2.416.134,99)	99,67
501	40301	01	20				Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.119.630,00	16.750.000,00	(369.630,00)	97,84
501	40301	00	00	5	2	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.119.630,00	16.750.000,00	(369.630,00)	97,84
501	40301	01	20				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	629.487.528,00	627.564.370,00	(1.923.158,00)	99,69
501	40301	00	00	5	2	02	Pengadaan Mebel	69.923.608,00	68.781.470,00	(1.142.138,00)	98,37
501	40301	00	00	5	2	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	559.563.920,00	558.782.900,00	(781.020,00)	99,86
501	40301	01	20				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.610.839,00	56.494.352,01	(116.486,99)	99,79
501	40301	00	00	5	2	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
501	40301	00	00	5	2	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.610.839,00	56.494.352,01	(116.486,99)	99,79
501	40301	01	20				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.301.860,00	24.295.000,00	(6.860,00)	99,97
501	40301	00	00	5	2	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.301.860,00	24.295.000,00	(6.860,00)	99,97





BAB IV

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan”, dengan indikator sebagai berikut:
 - Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah sebesar 97,14%
 - Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Baik, realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021 adalah sebesar 105%
2. Untuk analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan”, dengan indikator sebagai berikut:
 - Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan, realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep Tahun 2021 adalah sebesar 50%
3. Realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Sumenep yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu rata-rata sebesar 100%, dengan efisiensi anggaran sebesar 9,23%
4. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat





peningkatan kinerja, seperti kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat, dan instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih bersifat kuantitatif

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD.
2. Sepanjang tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep telah secara optimal mengupayakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas. Secara umum dapat terlihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran dan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja yang sangat baik.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep juga telah mengupayakan secara optimal sumber dayanya dalam pencapaian target target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021.
4. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bappeda pada tahun-tahun berikutnya.



LAMPIRAN :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si**

Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.**

Jabatan : Bupati Sumenep



selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan apabila target kinerja dimaksud tidak tercapai karena bukan faktor eksternal, maka kami bersedia dimutasi.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Sumenep, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1. Persentase Target Tahunan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai	82%
1.1.a	Meningkatnya Konsistensi Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1.a Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai regulasi	100%
		1.1.1.b Persentase Target Program Prioritas PD yang tercapai	83%
2.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	2.1. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD (Program, Indikator, dan Target Kinerja)	86%
2.1.a	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan OPD Bidang PPM terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	2.1.1.a Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
2.2.a	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	2.2.1.a Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%
2.3.a	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan OPD Bidang Infrastruktur & Kewilayahan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	2.3.1.a Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Infrastruktur & Kewilayahan	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.1. Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan	75%
3.1.a.	Meningkatnya Kualitas Penelitian Pengembangan Dan Inovasi Daerah	3.1.1.a. Persentase Hasil Penelitian Yang Ditindaklanjuti	100%
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	4.1. Persentase Capaian Kinerja (PD)	100%
4.1.a	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur BAPPEDA Kabupaten Sumenep	4.1.1.a Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
I	PERENCANAAN	10.194.910.494	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.519.793.672	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.549.304	
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.188.712.951	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.950.000	
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	665.569.360	
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.057.700	
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.993.938	
1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.960.419	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.297.524.604	
2.1.	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	527.728.240	
2.2.	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	54.939.834	
2.3.	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	714.856.530	
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.377.592.218	
3.1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	456.860.288	
3.2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	430.850.336	
3.3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	489.881.594	
II.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	999.274.694	
1.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	999.274.694	
1.1.	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	206.643.747	
1.2.	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	366.492.500	
1.3.	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	258.300.000	
1.4.	Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	167.838.447	
	JUMLAH ANGGARAN BELANJA	11.194.185.188	

Sumenep, 20 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. YAYAK MURWAHYUDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660129 198903 1 007